

KEBANGKITAN TURKI SEBAGAI KEKUATAN MENENGAH KAWASAN DAN PANDANGANNYA TERHADAP NEGARA-NEGARA UNI-EROPA DAN NEGARA DI SEKITARNYA

Yusa Djuyandi, Slamet Rizkiawan, Adani Julian Perdana

Departemen Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Bandung, Indonesia

Email: yusa.djuyandi@unpad.ac.id

ABSTRACT

Turkey is located between the Balkan peninsula, the black sea region and the Mediterranean sea, borders the Middle East, then Turkey's geographical position is located between Europe and Asia, where this makes Turkey in a strategic area so that many are directly adjacent to the surrounding countries. In this regard, Turkey, which, when viewed 10-15 years ago, was a middle power and 2-3 years ago, the Turkish leader, Recep Tayyip Erdoğan, began to make changes in the values of modern, secular Turkey. The authors in this study used a qualitative method of studying literature whose qualitative research has the aim of understanding the meaning, a certain context, anticipating unexpected phenomena and influences, and understanding how the process works. The literature collected and analyzed for data by the author comes from secondary sources such as articles and online news, books, scientific publications or journals and other sources that if possible can help add to the treasures that can be guaranteed as well as tested for validity. Regarding the process of Turkey's revival and its views and aims of this revival, Turkey wants to take a leading role in the Middle East and the Muslim world.

Keywords: Turkey, revival, power, the Middle East

ABSTRAK

Turki yang terletak antara kawasan semenanjung Balkan, regional laut hitam dan laut mediterania, berbatasan dengan Timur Tengah, lalu posisi geografis Turki yang terletak antara Eropa juga Asia, dimana hal ini membuat Turki berada pada daerah strategis sehingga banyak berbatasan langsung dengan negara yang ada disekitarnya. Berkaitan dengan itu, Turki yang apabila dilihat 10-15 tahun kebelakang yang merupakan kekuatan menengah dan 2-3 tahun kebelakang pemimpin Turki yaitu Recep Tayyip Erdoğan mulai melakukan perubahan-perubahan nilai dari Turki modern yang sekular. Adapun penulis dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi literatur yang penelitian kualitatif ini memiliki tujuan untuk memahami makna, konteks tertentu, mengantisipasi fenomena dan pengaruh yang tidak terduga, serta memahami bagaimana prosesnya. Literatur yang dikumpulkan dan dianalisis data nya oleh penulis berasal dari sumber sekunder seperti artikel dan berita daring, buku, publikasi ilmiah atau jurnal dan sumber-sumber lain yang sekiranya dapat membantu menambah khazanah yang dapat dijamin sekaligus diuji validitasnya. Mengenai proses kebangkitan Turki dan pandangannya serta tujuan dari kebangkitannya ini, Turki ingin mengambil peran utama di Timur Tengah dan dunia Muslim.

Kata kunci: Turki, kebangkitan, kekuatan, Timur Tengah.

PENDAHULUAN

Apa yang sedang terjadi pada kondisi pasca perang dunia ke-2 adalah munculnya dua arus utama dunia yaitu Amerika dan juga Uni Soviet. Perkembangan hegemoni dua negara ini tercermin lewat berbagai kebijakan luar negeri mereka pada saat perang dingin berlangsung. Lalu setelah kekalahan

Uni Soviet pada tahun 89-90, secara otomatis, Amerika menjadi negeri adidaya. Beberapa saat setelahnya dominasi Amerika atas dunia begitu kuat, hingga berkembang pada saat ini dengan kemunculan dua kekuatan baru. Munculnya Cina sebagai kekuatan lain dunia saat ini sebenarnya sudah diprediksi oleh Huntington, selain itu

kemunculan kelompok, dengan nuansa keIslamanpun sudah mulai bermunculan saat ini. Salah satunya adalah kemunculan Turki yang bagi beberapa pihak dianggap sebagai aktor yang akan mengawali kebangkitan nilai-nilai keIslaman. Selain itu Turki saat ini bisa dikatakan sebagai sebuah kekuatan baru terkhusus bagi kawasan sekitar timur tengah atau laut mediterania.

Secara singkat, apa yang coba diprediksi oleh Huntington dalam tulisannya yang berjudul *clash of civilization* yang melihat bahwa sebenarnya ideologi tidak pernah mati, namun apa yang terjadi pada saat ini adalah kondisi dunia yang berpindah dari pola pengaruhi ideologi ke peradaban. Salah satu peradaban yang setidaknya bisa melawan sebuah hegemoni barat saat ini adalah peradaban Cina dan Islam (Huntington, 2005). Berfokus pada kemunculan suatu entitas yang mampu mengganggu hegemoni barat itu seperti banyak yang memprediksi akan dipimpin oleh Turki. Dalam beberapa tahun terakhir lewat pemimpinnya saat ini yaitu Erdogan, Turki secara lambat laun diubah wajahnya dari yang bercorak peninggalan Mustafa Kemal Ataturk yang bernuansa sekular ke wajah yang jauh lebih memperlihatkan sisi historis turki sebagai sisa dari kekhalifahan Islam dan juga dianggap sebagai penjaga terakhir nilai-nilainya.

Turki yang terletak antara kawasan semenanjung Balkan, regional laut hitam dan laut mediterania, berbatasan dengan Timur Tengah, lalu posisi geografis Turki yang terletak antara Eropa juga Asia, dimana hal ini membuat Turki berada pada daerah strategis sehingga banyak berbatasan langsung dengan negara yang ada disekitarnya. Kemunculan Turki disebut oleh Nainggolan dalam kajiannya bahwa mereka merupakan kekuatan

baru bagi studi kawasan Timur Tengah selain dua kekuatan menengah seperti Saudi Arabia dan Iran yang dianggap sebagai negara dengan “*middle power*” (kekuatan menengah). Melanjutkan dari pembahasan diatas Turki merupakan negara dari luar kawasan tersebut yang ikut berpengaruh dalam perkembangan kawasan tersebut (Nainggolan, 2020). Dalam tulisannya tersebut juga Nainggolan menganggap Turki adalah hasil dari dampak melemahnya kuasa amerika sehingga kekuatan menengah baru muncul dan Turki salah satunya.

Kemunculan Turki sebagai kekuatan baru setidaknya memang sudah dimulai bila kita melihat mundur ke kurun waktu 10-15 tahun belakang. Selain kemunculan Turki tersebut menjadi sebuah kemunculan kekuatan menengah baru dalam studi keamanan, Turki dalam tulisan lain dianggap menjadi representasi sebuah nilai *superstruktur* keagaamaan yang muncul sebagai pihak yang memulai gerakan tersebut. Seperti apa yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa Turki bisa saja menjadi aktor yang memulai kebangkitan Islam itu sendiri, selain itu apa yang ingin dilakukan Turki bisa menjadi indikasi merupakan perlawanan terhadap hegemoni barat. Lembaga *think tank* yang berbasis di Washington D.C bernama POMED yang merupakan singkatan dari *Project on Middle East Democracy* yang fokus pada proyek tentang demokrasi di Timur Tengah ini, menilai sampai saat ini bahwa fokus kebijakan luar negeri terhadap perlawanan atas hegemoni negara-negara barat menjadi arah turki itu sendiri. Selain itu POMED juga menganggap bahwa pemimpin Turki saat ini dibawah Erdogan memiliki keinginan kuat untuk menjadikan Turki untuk memimpin gelombang Islam populis non-sektarian dalam rangka

melawan hegemoni tersebut (Syahrianto, 2020).

Anggota senior Pomed yaitu Howard Eissentat menanggapi bahwa Turki sudah memulai langkah tersebut dengan mendukung negara yang memiliki akar kebudayaan atau etnis yang sama, walaupun masih banyak polemik muncul tentang bangsa kurdi. Tindakan-tindakan seperti kebijakan Turki di negara muslim lain, seperti membantu menerjunkan militer di Sudan, Libya dan Somalia, menurut Eissentat merupakan ambisi historis lama Turki. Selain itu Ia menganggap keterlibatan Turki pada konflik-konflik yang ada, menurutnya dianggap sebagai usaha untuk menjadikan mereka sebagai tokoh sentral di Timur Tengah sekaligus juga umat Muslim. Pada akhir ia berpendapat bahwa “pemerintah Turki percaya bahwa mereka memang harus mengambil sikap pada dinamika regional dan global yang jauh lebih mendasar agar Turki mempunyai wadah yang layak untuk ditunjukkan dalam perkembangan dan dinamika sistem global yang berjalan ini (Syahrianto, 2020). Melihat hal tersebut apa yang pandang oleh POMED adalah bagaimana sebenarnya usaha Turki seperti yang telah disebutkan menjadi alasan mengapa kemunculan Turki ini perlu mendapat perhatian.

Turki seiring dengan kemunculannya itu yang dianggap sebagai kekuatan baru juga sebenarnya memiliki beban sejarah Panjang, dikarenakan hadirnya Turki sebagai negara setelah kekuasaan Ottoman dan merasa memiliki kewajiban untuk tampil menjadi sebuah kekuatan yang merepresentasikan Turki sebagai sebuah negara yang besar. Sama seperti yang disebut sebelumnya dengan dianggapnya kekuatan Amerika Serikat melemah dan surut terkhusus pada kawasan Eropa dan Timur Tengah

menjadi kesempatan tersendiri bagi Turki untuk muncul sebagai kekuatan tersebut. Lalu kemunculan Turki sebagai kekuatan yang mewakili Islam, diharapkan bisa dibantu oleh negara-negara arab sekitar sebagai representasi nilai. Dengan beban sejarah dimana Turki pernah menjadi bagian kekuatan besar dunia, hingga pada tanggal 3 Maret tahun 1924, Turki mengalami peristiwa besar dimana Kekhalifaan Turki digusur dan diganti oleh Mustafa Kemal Attaturk yang mengadopsi sistem pemerintah modern dalam bentuk republik (Sakinah , 2020).

Ada satu hal yang menarik yang berjalan beriringan dengan usaha Turki menjadi sebuah simbol kekuatan baru yang menjadi representasi kawasan, atau kekuatan baru disebuah kawasan tersebut. Nama Erdogan tidak bisa diabaikan begitu saja, karena dalam studi keamanan yang melihat Turki sebagai sebuah kekuatan baru, Erdogan dianggap menjadi aktor penting dalam perkembangan sejarah sekaligus pengubah Turki itu sendiri. Erdogan dalam perkembangannya sendiri merupakan seorang tokoh yang tumbuh besar dilingkungan dengan dinamika dalam memunculkan Islam sebagai sebuah pilihan alternatif hingga bisa ditransformasikan kedalam kemunculan kekuatan yang luar biasa. Setidaknya dalam melawan dimensi sekular yang sudah lama menjadikan Turki dalam masa yang dianggap tidak stabil, seperti adanya gerakan nursiyah dan lain sebagainya. Pergulatan antara penyampaian nilai Islam di Turki ikut dipelopori oleh Erdogan, dengan menjadikan Gulen dan Erbakan sebagai contoh, dimana dinamika tersebut menginspirasi seorang Erdogan dalam memiliki pemikiran politiknya. Usaha tersebut tidak lain sebagai usaha yang dilakukan oleh Erdogan untuk menyaingi narasi sekular ala Attaturk

yang sudah lama melekat di Turki. Setidaknya ada 6 pokok pemikiran politik Erdogan, sebagai bentuk merubah dan merevolusi pemikiran yang ada sebelumnya, yaitu: 1) *kehadiran Turki baru*, 2) *kontrol militer yang harus dikuasai*, 3) *mengganti pola sekular yang sudah tertanam di masyarakat Turki*, 4) *bergabung dengan Uni Eropa* 5) *menjaga dan mengkokohkan ideologi yang dianut mayoritas masyarakat Turki yaitu ideologi Islam*, 6) *melebarkan sayap dari ekonomi Turki* (Bahri, 2017).

Pergolakan selanjutnya adalah bagaimana sebenarnya hubungan Turki dengan EU. Pada pokok pemikiran politik Erdogan tersebut salah satunya adalah “menuju Uni Eropa”, apa yang diharapkan adalah bagaimana proses pengintegrasian Turki dengan Uni Eropa tersebut, karena mungkin Turki merasa mereka lebih dekat secara historis dengan Eropa, daripada Asia. Namun usaha Turki dalam proses pengintegrasian mereka dalam uni eropa mengalami banyak dinamika. Pada saat KTT UE di Helsinki digelar, Turki secara resmi diterima sebagai kandidat UE. Sementara apa yang menjadi permasalahan adalah penyelesaian masalah dalam negeri Turki yang sering dianggap menjadi penghambat Turki dalam proses menuju Uni Eropa tersebut. Syarat utama menjadi anggota adalah *stabilitas institusional sebagai jaminan untuk demokrasi juga ketertiban sebagai negara hukum, selanjutnya adalah menjunjung tinggi HAM, dan juga menjaga hak-hak minoritas disana*. Lalu langkah yang dilakukan adalah 1) *mengurangi peran militer*, 2) *menghargai hak-hak minoritas lewat dibolehkannya penggunaan bahasa kurdi*, 3) *menghargai HAM, dalam hal ini isu Hijab menjadi pembahasan*, 4) *melakukan liberalisasi ekonomi dengan*

berdasar pada standar UE (Rofii, 2017). Setidaknya dalam proses tersebut secara singkat Turki melakukan banyak hal dalam proses integrasi mereka ke Uni Eropa agar bisa mempercepat akselerasi mereka menjadi sebuah kekuatan baru dikawasan tersebut.

Setidaknya dalam perkembangan Turki sebagai kekuatan baru entah merupakan bentuk refleksi nyata representatif peradaban Islam dari apa yang diprediksikan oleh Huntington. Apakah hanya melihat bahwa dengan melemahnya fokus Amerika pada kawasan tersebut mendorong Turki sebagai negara yang mampu hadir sebagai bentuk kekuatan baru dengan segala dinamika apa yang terjadi didalamnya. Pada pembahasan kali ini apa yang ingin dimunculkan adalah bagaimana mencoba menelaah apa yang menjadi alasan Turki bangkit sebagai kekuatan baru, lalu bagaimana *point of view* Turki dalam melihat keamanan mereka dalam hal studi keamanan kawasan terkhusus dengan hubungannya dengan kawasan tersebut.

METODE PENELITIAN

Dalam menulis tulisan ini, penulis membutuhkan identifikasi melalui penelusuran dan pemahaman mendalam untuk melihat konteks tentang Turki sebagai kekuatan menengah yang sedang bangkit di kawasan serta bagaimana turki melihat negara uni eropa dan negara disekitarnya. Adapun dalam menjelaskan tulisan ini, penulis menggunakan salah satu pendekatan penelitian kualitatif yaitu studi literatur. Dimana menurut Maxwell, penelitian kualitatif ini memiliki tujuan yaitu untuk memahami makna, konteks tertentu, mengantisipasi fenomena dan pengaruh yang tidak terduga, serta memahami bagaimana prosesnya. Literatur yang dikumpulkan dan

dianalisis data nya oleh penulis berasal dari sumber sekunder seperti artikel dan berita daring, buku, publikasi ilmiah atau jurnal dan sumber-sumber lain yang sekiranya dapat membantu menambah khazanah yang dapat dijamin sekaligus diuji validitasnya. Selain itu penulis menggunakan teori Realisme dan juga *Security dilemma* sebagai teori penguatnya.

LANDASAN TEORI

Realisme

Apa yang membuat politik suatu negara dengan hubungan sejarah itu sendiri berangkat dari masalah evolusi sejarah yang ada Fukuyama (2003) (Asrudin, 2014). Dalam perkembangannya hubungan antara bagaimana sejarah itu berjalan membuat sebuah pertanyaan sejarah yang kontradiktif namun disisi lain juga dialektis. Sisi dimana berjalannya sebuah hubungan politis dalam perkembangan suatu negara, entah itu naik turunnya peradaban sebuah negara, atau pada studi kontemporer akan banyak berbicara bagaimana konteks negara pada lingkungan internasional, setidaknya bisa dilihat pada sisi historis itu sendiri. Asrudin secara jelas mencoba melihat bahwa hasil dari sejarah bergerak pada dua kutub berbeda kemajuan (*endisme*), atau kemunduran (*deklinisme*). *Endisme* dan *deklinisme*, mungkin adalah pembahasan mengenai hasil atau dampak yang dihasilkan, namun berbicara aspek politik, maka penting pula dalam melihat atau membahas bagaimana proses itu berjalan sebenarnya, karena aspek historis sekalipun tetap ada unsur variabel yang membentuk sejarah, entah kejadian atau aktor yang sedang bermain didalamnya, ini menjadi sebuah pembahasan yang insinuatif pada sisi politis bagaimana sebenarnya negara mencoba

memposisikan dirinya pada kejadian yang melibatkannya pada lingkungan internasional,

Berangkat dari pandangan diatas, selanjutnya adalah membahas bagaimana pola perjalanan yang melibatkan pembahasan mengenai perubahan sejarah juga masalah didalamnya. Dalam pembahasan yang memiliki kecenderungan penggunaan paradigma realisme menganggap apa yang terjadi merupakan sebuah aspek yang dibawa manusia. Secara singkat realisme berdasar pada apa yang sudah menjadi bawaan dari manusia itu sendiri, dan melihat sejarah hanya menjadi penghias dari hal tersebut, bukan menjadi unsur utamanya.

Tradisi realisme ini sebenarnya berasal dari budaya pembahasan hubungan internasional. Dalam budaya kajiannya, apa yang menjadi alasan atau dasar atas munculnya “imperialism” merupakan hasil bawaan dari manusia itu sendiri. Dengan dasar ini realisme politik bisa menjadi sebuah unit metode analisis dalam melihat studi hubungan internasional, dimana basis penggunaannya akan selalu melihat realitas yang ada, bukan pada apa yang seharusnya dilakukan. Sebagai contoh yang lain pandangan ini menganggap bahwa konflik itu sendiri sudah berada pada garis ambang batas, dikarenakan sifat alamiah manusia dan dari hal yang mereka pilih akan berfokus pada pengorganisasian sebuah bentuk negaranya sendiri ketimbang berbicara mengenai menghormati sebuah otoritas tinggi atau diluar negaranya (Asrudin, 2014). Hal tersebut dengan demikian menjadi landasan bagi para kaum realis, landasan tersebut berupa pemusatan perhatian pada eksplorasi atas kontrol kekuasaan serta kekuatan yang secara alamiah merupakan bawaan manusia itu sendiri, maka dari itu alasan alasan diatas menjadi dasar bagi munculnya

konflik, terkhusus bagi para realis (Sorensen, 2003).

Lalu apa yang menarik selanjutnya, bahkan dengan kepercayaan kaum realis itu sendiri akan penyebab akan konflik berasal dari manusia itu sendiri, mereka disatu sisi merasa tidak yakin dengan kemampuan akal pikiran manusia dalam pemecahan masalah itu sendiri. Mengapa hal tersebut bisa terjadi, mungkin apa yang dijelaskan oleh Asrudin sebelumnya bisa menjadi dasar. Mereka cenderung menganggap dan teguh bahwa di luar kemampuan manusia terdapat kekuatan kasual yang berjalan dengan sendirinya dan tidak bisa dihindarkan terkhusus bagi hubungan suatu negara dengan lingkungan internasional.

Morgenthau dalam tulisannya yang berjudul "*Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace*" beranggapan bahwa, bagi realis prinsip moral dalam pembahasan hubungan internasional tidak dapat diterapkan. Apa yang menjadi asumsi dasar adalah karena mereka beranggapan bahwa lingkungan internasional tidak ada yang mengatur hal-hal mengenai moralitas individu dan berbeda dengan lingkungan domestik dimana ada kekuatan untuk mengatur hal tersebut. Jadi apa yang ditekankan dalam *realisme politik* bagi mereka adalah sebuah hal pembeda yang signifikan terhadap apa yang dikehendaki oleh mereka, hal yang memungkinkan, lalu dimanapun dan kapanpun hal yang menjadi harapan nya (Morgenthau, 1985). Maka dari itu Hoffman pun berpendapat bahwa karena lingkungan internasional yang anarkis, akibat hal tersebut berimbas ketika manusia memilih keadaan kedamaian dan menghindari peperangan, bagi Hoffman bahkan bagi mereka yang memiliki pandangan terhadap teorinya Hobbes sekalipun akan berpikiran seperti apa

yang telah disebutkan pada bagian sebelumnya, dan akan selalu muncul perasaan ketidakamanan hingga hal ini bisa diredam ketika sudah tercapai kondisi yang bebas dari ancaman atau permusuhan (Hoffman, 1988).

Sebuah pertanyaan pun diajukan oleh Asrudin dalam tulisannya, dimana pertanyaannya adalah mengapa pemikir realisme ini menjadi sinis terhadap dinamika yang terjadi dalam politik internasional? dan, lalu mengapa bagi para realis sebuah ancaman keamanan, konflik dan hal yang anarki menjadi sebuah hal yang mutlak lalu hal tersebut akan berjalan terus selagi negara masih merupakan unit independen (Asrudin, 2014). Selanjutnya apa yang dapat menjawab pertanyaan tersebut akan menarik apabila melihat pendapat dari Vioti dan Kauppi, dimana menurut mereka setidaknya ada empat hal pokok yaitu ; 1). Negara dipandang sebagai pelaku utama sekaligus pelaku terpenting, 2). Negara dipandang sebagai kesatuan aktor, 3). Negara secara esensial diasumsikan sebagai aktor yang rasional, 4). Keamanan nasional merupakan isu utama dan menempati tempat teratas di samping isu-isu lainnya (Viotti & Kauppi, 1999).

Negara dipandang sebagai pelaku utama sekaligus pelaku terpenting, asumsi ini datang dari bagaimana penggunaan negara sebagai unit analisis yang diutamakan dalam pembahasan studi internasional. Pembahasan tersebut entah mengenai fenomena klasik seperti polis di Yunani, ataupun negara saat ini pada fenomena yang jauh lebih kontemporer. Realisme bukannya tidak mementingkan aktor lain, seperti organisasi internasional dan sebagai macamnya, namun penekanannya ada pada negara sebagai sebuah sumber utama analisis dalam hal tersebut. Negara dipandang sebagai kesatuan aktor, sebagai sebuah unit analisis,

mengambil pada sudut pandang sebuah organisme yang terintegrasi maka negara bisa dikatakan demikian. Pada analisis internasional sekalipun, negara dianggap sebagai sebuah kesatuan unit yang terintegrasi dimana sebenarnya yang mereka lawan berupa lingkungan internasional, pun sama halnya demikian yang proses kesatuan tersebut terwujud dari pemerintah, dimana pemerintah memiliki peran yang luar biasa dalam hal tersebut, tentu saja dengan tujuan untuk negara itu sendiri. Negara secara esensial diasumsikan sebagai aktor yang rasional, dalam suatu metode pembuatan dan pengambilan keputusan kebijakan luar negeri, terdiri dari proses perumusan hingga pengimplementasiannya pasti melewati sebuah proses agenda setting dengan melihat adanya banyak kemungkinan yang muncul. Maka negara dianggap sebagai aktor yang rasional karena pertimbangan mengenai pilihan yang mereka susun telah melewati proses pertimbangan yang matang, namun lagi lagi sisi pesimistis realis pada kemampuan akal pikiran manusia menanggapi sering kali aktor negara berupa manusia salah dalam mengartikan kondisi internasional yang ada.

Keamanan nasional merupakan isu utama dan menempati tempat teratas di samping isu-isu lainnya, apa yang dikatakan Hoffman sebelumnya yang menganggap bahwa lingkungan internasional merupakan lingkungan yang anarkis, maka negara senantiasa berada pada kondisi yang tidak aman. Maka dari itu aspek militer juga isu politik berkaitan pada studi ini, karena realis selalu memusatkan perhatian pada kesempatan bagi terjadinya konflik, maka dari itu dalam pandangan seorang realis keamanan militer juga isu strategis berada pada tingkatan yang tinggi (*high politics*), dan sisi sosial

ekonomi ditempatkan pada posisi yang lebih rendah dari analisis prioritas politiknya (Viotti & Kauppi, 1999).

Selain itu apa yang selanjutnya berkembang adalah pendekatan dari realisme klasik serta neo-realisme. Bahkan terdapat dua perkembangan dari varian neo-realisme yaitu ofensif dan juga defensif. Bagi para penganut klasik, apa yang menjadi pokok pemikirannya ada pada bagaimana negara itu seperti manusia, dimana sebagai bawaannya memiliki hasrat yang terpuaskan untuk mendominasi. Sementara pendekatan neo-realisme defensif sendiri lebih melihat dan fokus terhadap efek yang ditimbulkan dari Sistem Internasional. Dimana Sistem Internasional adalah suatu keadaan suasana yang masing-masing kekuatan mengupayakan ketahanan dan tetap bersikukuh dalam Sistem Internasional yang anarkis (Waltz, 1979). Mearsheimer yang seorang neo-realisme ofensif juga melihat bahwa struktur sistem menentukan bagaimana sebenarnya negara berperilaku, lalu bagaimana sebuah negara saling berbalas-balasan melihat diri sehingga mengakibatkan hadirnya anarki internasional (Mearsheimer, 1994).

Security Dilemma

Melanjutkan dari pembahasan mengenai realisme, apa yang muncul dari perkembangan tradisi realisme adanya neo-realisme yang kemudian kembali turun menjadi dua varian ofensif-defensif. Berawal dari bagaimana berkembangnya dua varian dari neo-realisme itu sendiri berangkat dari penggunaan konsep *security dilemma*. Konsep *security dilemma* ini merupakan sebuah fenomena aksi-reaksi diantara beberapa negara yang berupa sebuah tindakan mengambil untung dalam meningkatkan keamanan negaranya dan dianggap akan

melemahkan keamanan negara lainnya (Jervis, 1978). Glaser dan Kauffman memberikan pendapat dalam mengurangi gejala *security dilemma*, lewat kajiannya tentang ofensif-defensif, menyatakan bahwa ketika dimensi ofensif meningkat akan memunculkan *security dilemma* itu sendiri, dan untuk menyesuaikan Glaser dan Kauffman sebuah perang bisa saja dicegah ketika *defense* mengungguli *offense* atau dalam pengertian lain adalah *zero sum game* (Glaser & Kauffman, 1998).

Dengan asumsi dasar dari Hoffman berupa negara dan manusia memiliki kondisi dasar yang sama yaitu hasrat untuk mendominasi, pada akhirnya kemungkinan terjadinya konflik akan semakin besar. Maka dari itu perang yang akan terjadi disebabkan karena kemudahan sebuah negara kuat untuk menaklukkan negara lain, maka dibutuhkan pergeseran keseimbangan *offense-defense* dapat membuat resiko sebuah negara berkonflik dengan negara lain semakin besar dalam hal ini Van Evera memberi contoh berupa perang (Evera, 1998). Hal ini didukung oleh pendapat Mearsheimer dalam Kreisler (2002) yang memiliki pandangan masing-masing negara secara berkelanjutan akan mengupayakan kekuatan mereka menjadi lebih hegemonis dan agresif, sehingga pada akhirnya target nya adalah berupaya dan mengusahakan untuk lebih mendominasi dari suatu sistem ataupun keseluruhan sistem tersebut atau bahkan menjadi pihak yang menguasai kawasan-kawasan yang ada di dunia.

Secara singkat apa yang dimaksud dengan dilema keamanan merupakan sebuah kondisi yang lahir dari bagaimana tradisi realis melihat hubungan antara negara pada lingkungan internasional. Poin keempat

yang dikemukakan oleh Viotti dan Kauppi yang dijelaskan sebelumnya di atas tentang keamanan nasional merupakan sebuah isu utama dan perlu mendapat prioritas politik. Maka dari itu kondisi dilema keamanan akan terus muncul beringan dengan kontestasi perang pengadaan alat persenjataan suatu negara entah mereka yang fokus menambah kekuatan, atau fokus pada penyeimbangan kekuatan dengan negara-negara besar.

Sedikit menarik, ketika seiring berjalannya anggapan mengenai konsep dari dilema keamanan yang melihat pola perlombaan tiap negara dalam bidang keamanannya berjalan. Namun kritik pun datang dan ini penulis anggap menjadi bagian yang menarik dalam pembahasan. Van Ness mencoba mengkritik realis dimana sebenarnya kondisi sekarang adalah kondisi lingkungan internasional yang harmonis, Ness menyatakan bahwa justru negara-negara kecil tidak dalam keadaan untuk mengejar ketertinggalan dengan negara penguasa yang lain, tapi mereka mencoba mendorong pada sisi kesepakatan lewat perjanjian, Ness menyebutnya dengan strategi *win-win*. Selanjutnya kritik menarik karena Ness melihat sebenarnya yang sekarang sering terjadi lebih pada keamanan daripada mencoba mengejar ketertinggalan. Asumsi dasar dari para realis yang melihat lingkungan internasional memiliki banyak variabel yang *unpredictable*, dan memiliki kemungkinan pada arah konflik, nyatanya berjalan dengan damai. Ness menganggap bahwa yang terjadi adalah negara-negara mencoba untuk melakukan kerjasama yang saling menguntungkan daripada mencoba melihat bahwa negara-negara sedang berkompetisi Van Ness (2014) dalam (Asrudin, 2014). Walaupun metode Van Ness tidak berlaku pada konflik negara

yang berbeda sumbu ideologis serta historisnya, maka empat prinsip dari Viotti dan Kauppi masih bisa relevan pada pembahasan tulisan ini.

Organisasi Internasional

Secara singkat apa yang bisa didefinisikan organisasi internasional akan merujuk pada bagaimana pandangan terhadap tujuan yang hendak dicapai, institusi-institusi yang ada, dan sebuah proses perkiraan sebuah peraturan yang dibuat oleh otoritas negara berupa pemerintah dengan aktor non-negara (Coulumbis & James, 1999). Selanjutnya dalam artian lain organisasi internasional dapat diartikan sebagai sebuah struktur formal yang berkesinambungan, dimana pembentukannya didasarkan pada perjanjian antar negara anggota untuk mencapai tujuan bersama (Archer, 2001). Jadi apa yang diartikan sebagai sebuah organisasi internasional adalah sebuah organisasi yang merupakan sebuah stuktur dimana didalamnya terhimpun keanggotaan lebih dari dua negara dengan perjanjian tertentu untuk mencapai tujuan Bersama. Dalam sudut pandang realis kehadiran organisasi internasional merupakan sebuah bentuk kegiatan para aktor yang berbentuk negara melakukan apa yang mereka lakukan untuk tujuannya masing-masing secara bersamaan.

Lain halnya, Alvares (2006, hal. 324) mendeskripsikan Organisasi Internasional sebagai suatu kehadiran dari pemerintahan internasional dan berlandaskan pada keterikatan dari perjanjian yang dimana secara lumrah tersusun dari adanya sekretariat tetap, sidang-sidang pleno dengan keterlibatan seluruh anggota, dan organ eksekutif dengan partisipasi terbatas. Organisasi internasional dalam konteks ini merupakan bentuk institusi yang cenderung mengacu pada sistem

peraturan dan tujuan formal, serta instrumen administratif yang dirasionalisasi (Selznick, 1957: 8 dalam (Archer, 2001, hal. 2)).

PEMBAHASAN

Hal apa yang akan dibahas seperti yang telah disinggung pada bagian pendahuluan, yang dilihat adalah bagaimana kemunculan Turki sebagai kekuatan menengah yang baru bangkit, dan juga bagaimana Turki melihat kawasan UE, dan negara eropa disekitar Turki. Disisi lain metode analisis yang digunakan adalah melihat apa yang dilakukan oleh Turki sejauh kemunculannya sebagai kekuatan yang baru bangkit pada masa kepemimpinan Recep Tayip Erdogan dengan merujuk pada empat hal pokok yang dikemukakan oleh Viotti dan Kauppi. Selain itu sebagai tambahan apa yang ingin penulis sampaikan adanya sebuah fenomena “*offense-defense*” dalam melihat Turki dan hubungannya pada Uni Eropa dan negara di kawasan sekitar Turki.

Sebagai kekuatan baru setidaknya menuju perubahan besar di Turki dalam bentuk negara republik dan bukan dalam bentuk kekhalifaan. Turki modern yang mengadopsi bentuk sekular, atau sering dikatakan sebagai aliran kemalism di Turki ini senyatanyat tidak menjawab permasalahan yang muncul diakhir masa Kekhalifahaan Utsmaniyah. Permasalahan sehari-hari masyarakat mengenai kesejahteraan kelayakan hidup, dan pola kehidupan yang ingin diubah oleh pemikiran Atatturk nampaknya tidak berjalan dengan baik. Kelemahan dari masa pemerintahan Mustafa Kemal Atatturk adalah bagaimana masih terbukanya celah jurang pemisah yang besar antar penduduk kota dan desa, yang menyebabkan penyebaran nilai tersebut tidak berjalan dengan baik,

yang menjadikan pola kehidupan sekular hanya berlangsung pada masyarakat perkotaan saja (Junaidi, 2016).

Setelah selesainya masa Perang Dunia ke-2, dimana terjadinya sebuah keterbukaan politik yang besar di Turki, pada akhirnya usaha dalam memperbaiki dan meluaskan kebijakan sekularisasi mulai dibahas. Lalu pada tahun 1950 telah diselenggarakan pemilu bebas pertama yang dimenangkan oleh Partai Demokrat. Semenjak itu pemerintahan yang berdasarkan terhadap bermacam partai yang mengamini atas peranan agama Islam yang mengajarkan tentang peran sosial-moral, adapun pada perjalanannya metode pemerintahan yang dijalankan masih tetap menggunakan tradisi sekular, dan tidak pernah memulihkan secara langsung tradisi, atau nilai kebudayaan Islam dalam kehidupan politik di Turki (Ali & Mukti, 1994).

Berdasar pada apa yang disebutkan sebelumnya, bahwa perubahan yang terjadi di Turki malah tidak banyak berperan terhadap perkembangan Turki yang dikatakan mengadopsi metode modern berupa bentuk sekular. Anomali yang terjadi berupa adanya jurang yang besar antara pola kehidupan masyarakat daerah perkotaan dan pedesaan, lalu permasalahan sosial pada kehidupan sehari-hari di masyarakat nampaknya tidak terlalu efektif ditanggulangi pada masa itu. Ini menjadi tanda bahwa sebuah perubahan besar yang terjadi di Turki tidak menjadi penguat atau bahkan tidak mendorong Turki kearah yang jauh lebih baik, bahkan ada jurang perbedaan yang besar dalam pola kehidupan masyarakat di Turki. Hal ini pada akhirnya lambat laun membuat Turki berbenah, dan mencari cara atau

metode yang setidaknya bisa menyelesaikan masalah tersebut.

Apa yang dilihat dalam kacamata umum saat ini ketika melihat Turki sebagai kekuatan baru, adalah melihat Turki dan Pemimpinnya saat ini yaitu Recep Tayip Erdogan. Setidaknya pada era Erdogan Turki muncul sebagai sebuah kekuatan baru yang diperhitungkan. Masuknya Turki pada konflik di suriah, dimana secara tidak langsung mereka bisa dikatakan sedang “memamerkan kekuatannya”. Apa yang disebutkan oleh Howard Eissentat, lewat masa kepemimpinan Erdogan, Turki dianggap perlu mengambil sebuah sikap sebagai respon dari dinamika persaingan kekuatan regional dan global sebagai usaha dalam mendapatkan tempat yang layak dalam tatanan tersebut. Hal tersebut tercermin dari bagaimana masuknya militer Turki kedalam daerah konflik di negara-negara yang memiliki kesamaan akar budaya atau etnis dengan mereka. Eissentat mengatakan ini sebagai sebuah tindakan dimana Turki ingin mengambil peran utama di Timur Tengah dan dunia Muslim (Syahrianto, 2020).

Lalu sebenarnya apa yang mendasari penggunaan metode tersebut pada masa pemerintahan Erdogan di Turki? Mungkin apa yang bisa dilihat dalam proses pengambilan keputusan mengenai masuk atau ikut campurnya Turki sebagai sebuah usaha yang disebut oleh Eissentat sebelumnya sebagai “permainan peran Turki di Timur Tengah dan dunia muslim” bisa dikatakan hal yang mempengaruhinya adalah sisi ideosingkratik dari seorang Erdogan. Ideosingkratik pada tradisi realis merupakan bentuk dimana seorang figur pemimpin dalam proses pengambilan keputusan kebijakan luar negerinya dipengaruhi oleh latar belakangnya, sehingga apa yang terjadi

sebelumnya mempengaruhi proses berpikirnya (Rosenau, Boyd, & Thompson, 1976). Dalam hal ini perkembangan Erdogan dan pemikiran yang mempengaruhinya menjadi faktor, sebagai seorang muslim memang sepantasnya menjadikan sosok Rasulullah SAW menjadi teladan dalam bersikap, namun yang tidak jauh lebih penting adalah yang memberikan inspirasi Erdogan dalam pemikiran politiknya adalah Said Nursi, Fethullah Gulen dan Necmettin Erbakan. Sejarah serta pemikiran Nursi, Gulen, dan Erbakan nampaknya menjadi pengaruh bagi Erdogan sendiri — sedikit mengulang apa yang disampaikan pada pendahuluan — maka dari itu ini merupakan poin penting dari pemikiran politik Erdogan, 1) munculnya Turki baru, 2) penguasaan terhadap militer, 3) merubah paradigma sekular terhadap masyarakat Turki, 4) menuju uni eropa, 5) mempertahankan kembali ideologi Islam sebagai ideologi mayoritas masyarakat Turki, 6) mengembangkan perekonomian Turki (Bahri, 2017).

Setelah melewati perjalanan yang membangun pikirannya dalam berpolitik, akhirnya Erdogan mendirikan partainya sendiri pada tahun 2001, partai tersebut bernama partai keadilan dan pembangunan (*Adelet ve Kalkinma Partisi/ AKP*) (BBC News, 2007). Pada lansiran tersebut tidak disebutkan asas atau dasar Islam sebagai landasan dari pendirian partai tersebut (karena memang dilarang). Akan tetapi menggunakan citra sebagai partai demokratis konservatif dengan adanya kenyataan penggunaan nilai sosial-moral Islam yang diterapkan. Selain menjadi bagian hidup disana warga Turki melihat bahwa AKP ini menjadi cikal bakal penerus perjuangan Necmetin Erbakan yang memiliki kecenderungan dalam ideologi Islam (Junaidi, 2016).

Pendirian AKP merupakan sebuah tanda penanaman pemikiran dari Erdogan. AKP sendiri pada tahun 2002 tepatnya 3 November dengan 34,1 persen suara. Dengan kemenangan tersebut, awalnya yang menjadi perdana menteri yang ditunjuk oleh Presiden Turki Necdet Sezer adalah Abdullah Gul yang notabene merupakan wakil ketua partai AKP, ini dikarenakan saat itu Erdogan masih berstatus sebagai terpidana. Hingga pada tahun 2003, Erdogan mengisi kursi Perdana Menteri setelah kasusnya dianggap selesai. Bahkan pada tahun tersebut, seperti yang muat dalam harian BBC News pada tahun 2002, AKP memenangkan dua pertiga kursi parlemen, sehingga bisa dikatakan mereka membentuk sebuah pemerintahan partai tunggal (BBC News, 2007). Selanjutnya pada tahun 2007, seperti apa yang dijelaskan dalam (Junaidi, 2016) pada edisi pemilu selanjutnya AKP memenangkan Pemilu, dan berhasil mengamankan sektor strategis dimana pada tahun 2007 Abdullah Gul menjadi Presiden sementara kursi Perdana Menteri diduduki oleh Erdogan. Pada edisi tahun 2011, Erdogan kembali menjadi Perdana Menteri Turki setelahnya pada tahun 2014 akhirnya Erdogan berhasil menjadi Presiden Turki.

Lalu setelah melihat bagaimana perjalanan tersebut. Langkah selanjutnya yang dilakukan Erdogan adalah dengan melakukan reformasi serta memberlakukan kebijakan. Kebijakan dalam negeri yang dilakukan oleh Erdogan fokus pada bidang pendidikan, dan penanaman kembali nilai-nilai keIslaman, ini menjadi bentuk sebuah keharusan seseorang yang menjadikan Islam sebagai ideologinya, alih-alih hanya berfokus pada sesuatu yang ada pada dimensi moralitas. Kebijakannya diantaranya menggratiskan biaya pendidikan untuk

rakyat Turki, pengembalian pembelajaran yang memiliki basis keIslaman ke sekolah-sekolah secara menyeluruh. Selanjutnya Jainudin pun dalam tulisannya membahas bagaimana kebijakan dalam melegalkan Jilbab merupakan bentuk perlawanan bahkan pengkhianatan pada sekularisme yang telah dibangun oleh Kemal. Ini menjadi sesuatu yang lucu dimana, negara seperti Amerika dan kawasan Eropa jauh lebih sekular justru nilai kebebasan tersebut diperbolehkan.

Lalu pada pembahasan kali ini akan berfokus pada bagaimana Turki dalam manuvernya di dunia internasional, entah lewat kebijakan luar negerinya, masuknya militer Turki ke berbagai daerah konflik di negara-negara Timur Tengah, Afrika Utara, atau Sebagian Eropa dimana negara tersebut memiliki kesamaan akar budaya dengan Turki. Selanjutnya menarik apabila melihat kejadian yang cukup mengundang apresiasi dunia muslim (menjadi tanda bahwa Turki memang sedang memainkan peran dalam dunia Islam khususnya) dimana ketika diadakannya diskusi Internasional *world economic forum* di Swiss, ketika itu Erdogan bersebelahan dengan Shimon Peres yang menjabat sebagai Presiden Israel saat itu dan dengan berani menegaskan “Israel adalah negara yang lebih daripada sekedar barbar” lalu setelah itu ia pergi meninggalkan forum tersebut. Saat ini dukungan terhadap Palestina, Gaza, Yerusalem, menjadi sebuah isu hangat dalam diskusi negara-negara Islam atau mayoritas penduduk Islam, jadi ketika ada negara yang dengan lantang memberikan posisinya terhadap isu tersebut akan mendapat perhatian dan respon dari khalayak Islam.

Dalam melihat bagaimana Turki muncul sebagai kekuatan baru, kita dapat sedikit bergeser terhadap tindakan

Turki dalam mengeluarkan kebijakan luar negerinya. Diantaranya 1). Menolak isolasi dan embargo terhadap suriah setelah invasi USA ke Irak dan pembunuhan mantan PM Lebanon Rafiq Hariri, 2). Menolak isolasi gerakan perlawan Islam Hamas dan bersikeras berinteraksi dengan mereka, sembari mendukung kemerdekaan Palestina, 3). Menolak mengirim pasukan tambahan ke Afghanistan oleh USA, 4). Menentang penggunaan militer dalam mengembargo Iran atas program nuklir, 5). Menentang pendekatan USA dalam menangani Partai Pekerja Kurdistan yang cenderung dilindungi dan dipersenjatai (Junaidi, 2016). Selain itu apa yang dilakukan oleh Erdogan dalam manuver politik luar negerinya berupa sering ikut campurnya Turki dalam konflik-konflik, seperti di Suriah, atau komunitas Uyghur di Cina. Walaupun terkadang sikap Turki yang dianggap Pro Islam dan cenderung moralis malah bertabrakan dengan kenyataan bahwa pendekatan Turki tidak semurni itu, tidak jarang pasca berseteru dengan suatu negara, Turki malah menjalin kerjasama dengan negara sasarannya dimana istilahnya adalah “pagi membela Uyghur, sore melakukan kontrak dagang dengan Cina” (Firmansyah, 2020). Ini menjadi sesuatu yang menarik sebenarnya banyak langkah yang ketika ditelaah kembali justru menimbulkan pertanyaan “apakah yang sedang dilakukan Turki?”.

Dalam menganalisis memakai prinsip Viotti dan Kauppi, ketika melihat bagaimana geliat Turki yang setidaknya dalam sedekade terakhir muncul sebagai kekuatan baru dan selain itu Turki dianggap sebagai sebuah awalan dari kebangkitan peradaban Islam. Permainan peran Turki dalam dunia Internasional perlu dilihat sebenarnya tindakan apa yang

sedang dilakukan. Pada bagian sebelumnya Turki seolah bermain pada dua sisi yang berbeda, dimana mereka ikut berperan dalam isu utama diskursus kawasan, dan dunia Islam selain itu, mereka juga tidak jarang melakukan tindakan pragmatis seperti kesepakatan dagang dengan negara yang mereka sedang konfrontasi.

Ketika melihat Turki, maka apa yang perlu dilihat adalah sebenarnya apa yang sedang diinginkan oleh Turki. Pada dunia internasional saat ini, pembahasan mengenai negara mana yang bermoral akan sangat sulit ketika melihat kenyataan dalam berbagai sudut pandang. Namun apa yang nyatanya terjadi adalah bagaimana Erdogan sebagai pemimpin Turki sedang menjalankan tugasnya sebagai seorang pemimpin negara yang mendorong kemajuan bagi negaranya. Bagaimanapun setelah era sekularisasi dimulai di Turki, nyatanya Turki tidak bergerak kemana-mana, alih-alih pro-barat sebagai usaha untuk mengintegrasikan negara tersebut dengan kawasan mapan, Turki hanya seolah diam ditempat. Pada akhirnya apa yang sebenarnya dilakukan Turki pada usaha bertahan dalam menghadapi dinamika rintangan keadaan global, adalah untuk kepentingan Nasionalnya sendiri. Setidaknya pada saat ini dengan bersumber pada data Eurostat Turki harus menghidupi warga negaranya.

Sebagai contoh adalah bagaimana kepentingan ekonomi Turki, setelah mencoba untuk keluar dari jerat *World Bank*. Pada saat ini Turki sedang fokus dalam sebuah upaya eksplorasi migas, terkhusus pada daerah Laut Aegea Mediterania Timur. Ini menjadi sebuah usaha untuk menyeimbangkan neraca keuangan Turki, dimana nilai mata uang Lira semakin merosot terhadap dollar. Dalam lansiran media republika, menyebut bahwa Turki menemukan

cadangan minyak dan gas terbesar di Laut Hitam dengan total 320 miliar meter kubik, diprediksi angka tersebut bisa memenuhi cadangan energi Turki hingga 20 tahun ke depan. Melanjutkan dari hal tersebut, lalu muncul sebuah ancaman, berupa bagaimana mengamankan sektor tersebut, maka dari itu Turki dengan gencar mencoba menjalin hubungan dengan negara yang berbatasan langsung dengan daerah tersebut (Firmansyah, 2020) dalam harian republika.

Cukup dengan alasan keamanan sektor tersebut, maka Turki setidaknya sedang bersaing bukan dengan satu negara saja, namun bisa saja melibatkan kawasan. Sebagai penguat adalah bagaimana Turki mencoba menjalin hubungan erat dengan Tripoli, di Libya, sebagai salah satu usaha mereka dalam mengamankan wilayah perbatasan tersebut, sementara ancaman datang dari Yunani dimana mereka telah meratifikasi perjanjian maritim dengan Mesir. Ini bisa menjadi ancaman tersendiri bagi Turki, karena bisa saja Yunani menggalang dukungan militer dari negara dikawasan Eropa. Maka dari itu kepentingan di daerah ketiga laut (Aegea, Mediterania, Hitam) ini menjadi begitu kuat. Maka dari itu dengan alasan keamanan mungkin apa yang dilakukan Turki dengan memasukan Militer untuk membantu Tripoli yang sedang berkonflik.

Secara nyata mungkin apa yang dilihat dunia muslim terhadap Turki adalah bagaimana Turki dan Erdogan adalah representasi nilai-nilai keIslaman di dunia Internasional. Namun bagaimanapun mereka adalah tetap sebagai sebuah unit negara, yang dimana harus tetap bertahan dari lingkungan internasional yang anarkis tersebut. Turki mau tidak mau harus mengambil sikap, selain atas dasar pertimbangan kalimat awal, tapi juga

untuk menunjukkan kembali hadirnya Turki sebagai salah satu poros kekuatan Dunia, ini bisa menjadi sesuatu hal yang kuat karena banyak dukungan datang dari komunitas Muslim di Dunia, yang sering melihat Turki sebagai sebuah citra yang baik dan perlu diikuti. Setelah mengamankan sisi citra tersebut mungkin manuver pragmatis yang dilakukan Turki bisa saja berjalan. Dalam hipotesis penulis mungkin saja reaksi komunitas muslim dunia terhadap sikap Turki ke bangsa Kurdi menjadi teralihkan.

Munculnya Turki sebagai kekuatan baru merupakan bentuk, kemungkinan dari Turki mencoba mengadaptasi sisi maksimalisasi *Offensif*. Alih alih bertahan dengan sedikit pendekatan zero sum, untuk mengurangi ancaman dari kawasan atau negara lain, Turki memilih untuk menunjukkan kapasitas sisi *Offensif* mereka. Sebagai contoh adalah reaksi mereka dengan mengirim bantuan militer ke daerah Suriah yang secara tidak langsung sedang *head to head* dengan Rusia. Ini menjadi sedikit menarik ketika melihat adanya kenyataan bahwa Turki tidak lagi menjadi sekutu NATO yang fokus menjaga sayap selatan yang fokus menahan laju ekspansionisme Rusia. Selain itu juga Turki menganggap bahwa penting bagi mereka untuk memiliki senjata-senjata luar biasa, Turki melihat contoh Israel sebagai tetangga mereka dimana Israel memiliki kekuatan senjata nuklir namun tidak ada negara lain yang bisa menyentuhnya. Apa yang ingin dilakukan Turki dalam kemunculannya adalah untuk melepaskan diri dari dinamika hegemoni dunia, dimana mereka akan selalu menjadi pihak yang memilih satu dari dua kekuatan hegemoni yang berseteru. Usaha dalam melepaskan itu sebagai caranya untuk membuat Turki

memiliki posisi tawarnya sendiri dalam memilih apa yang mereka lakukan, maka dari itu berangkat dari kepercayaan bahwa Turki adalah negara dengan unsur keIslaman yang kuat di Timur Tengah dan bisa menawarkan diri, dengan membuat sebuah poros baru. (CNN, 2019).

Sedikit tambahan pada apa yang sebenarnya terjadi pada kasus, kemunculan Turki dengan hubungannya pada negara dikawasan tersebut. Penulis melihat ini merupakan sebuah tradisi dinamika tarik ulur *offensif-defensif* dimana, upaya yang dilakukan Turki sebagai usaha penguatan keamanan negaranya dianggap menjadi ancaman bagi Yunani misalnya, sehingga untuk menyeimbangkan hal tersebut Yunani meminta bantuan pada negara-negara Eropa seperti Perancis, Italia, Spanyol, Portugal, Malta dan Siprus, jadi yang terlibat dalam dinamika tersebut bukan sekedar Turki-Yunani saja (Maulaa, 2020).

Pada akhirnya ini menjadi sebuah desakan dari militer Turki, lebih tepatnya dengan para perwira anti-Barat, Tanir dalam analisisnya melihat bahwa ini justru adalah dampak ketika Erdogan berhasil menguasai sisi militer pasca kudeta 2016, dimana para perwira ini juga yang sedang mengusahakan ekspansi di Laut Aegea, serta fokus terhadap perjanjian dengan Libya. Selanjutnya ketika melihat memanasnya kondisi di kawasan mediterania ini terdorong dengan kerja sama tersebut ditambah aktivitas-aktivitas menambah kekuatan militer dari aliansi tersebut seperti pengalih fungsian dana negara menuju dana keamanan Yunani diperkuat dengan aktivitas pembelian pesawat tempur dari Perancis seolah terlihat jelas melakukan konfrontasi kawasan dan sedang melirik Turki sebagai target (Sicca, 2020). Entah usaha kawasan dalam *zero-sum* atau apa

yang disebut Van Ness dengan “*kerjasama keamanan*” dimana aliansi tersebut melihat Turki sebagai ancaman.

Adapun belakangan ini skala dari sisi *offensif* Turki terlihat meningkat dikarenakan dikirimkannya kembali kapal peneliti seismik ke laut aegean dan mediteranian dengan tujuan untuk mengukur dan mencari cadangan sumber daya di kedua laut tersebut (Maulana, 2020). Selain itu Erdogan pun melakukan gertakan yaitu peringatan dan ancaman terhadap Yunani agar keduanya memulai pembicaraan mengenai sengketa atas klaim di teritorial Mediterania timur dalam rangka eksplorasi minyak dan gas disana. Selain dengan Yunani, Turki juga berhadapan dengan Siprus. Dimana semua pihak yang bersengketa telah mengerahkan angkatan laut dan udara untuk menegaskan kepemilikan wilayah tersebut (Dwina & Rostiyani, 2020).

Selanjutnya ketika melihat kekuatan Turki yang begitu besar dalam memobilisasi tindakan masyarakat keagamaan nomor dua terbesar di Dunia, ini bisa menjadi sumber ancaman bagi negara-negara yang secara bersamaan sedang berkonfrontasi dengan Turki lalu memiliki latar-belakang yang tidak baik dengan Islam. Turki dengan mudah memainkan peran pada aktivitas komunitas Islam dunia, sebagai contoh adalah ketika Presiden Perancis Macron mengeluarkan pernyataan, yang dalam hal ini memojokan Islam. Turki merespon dengan sebuah tindakan untuk memboikot produk asal Perancis nampaknya cukup sukses memberikan dampak kejut bagi Macron, hingga akhirnya menyebabkan dikeluarkannya pernyataan klarifikasi.

Dari dua hal tersebut apa yang terlihat adalah kemunculan Turki saat ini, dianggap sebagai sebuah ancaman bagi negara disekitarnya. Akhirnya

banyak negara yang mencoba tindakan *zero sum* dengan meningkatkan sisi defensif mereka. Selanjutnya ada yang melihat bahwa kehadiran Turki sebagai ancaman kawasan, terkhusus aktivitas Turki dalam ekspansinya di Mediterania Timur, dan Laut Aegea, hingga membuat beberapa negara membuat pertemuan untuk membentuk aliansi dalam melawan Turki dalam konflik Kawasan tersebut. Melihat Turki yang baru cepat berkembang selama sepuluh tahun terakhir, menjadi sebuah pertanda Turki setidaknya berada pada jalur yang tepat dalam usaha *shifting* mereka dari negara yang mencoba bertahan menuju negara yang membuat negara lain bertahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pada analisis yang telah dipaparkan diatas, dapat penulis simpulkan bahwa Turki sebagai kekuatan menengah di kawasan yang mulai bangkit dilihat dari historis terdahulu. Dimulai dari pergulatan pemikiran serta bentuk politik sekular di Turki apakah relevan atau tidak dengan kondisi negara pada saat ini. Dimana pemikiran ini berasal dari tokoh seperti Said Nursi, Fethullah Gulen dan Necmettin Erbakan yang mempertanyakan sekularisme sekaligus memiliki anggapan bahwa kembali ke ideologi Islam di Turki dahulu sebagai solusinya. Perjuangan pemikiran terdahulu ini diteruskan oleh Erdogan dan Abdullah Gul yang kemudian mendirikan dan menjadi pasangan pemimpin partai *Adelet ve Kalkinma Partisi* (AKP). Dimana partai ini tidak menjadikan asas atau dasar Islam sebagai landasan dari pendirian partai tersebut (karena memang dilarang). Akan tetapi menggunakan citra sebagai partai demokratis konservatif dengan adanya kenyataan penggunaan nilai sosial-moral Islam yang diterapkan.

Selain menjadi bagian hidup disana sehingga warga Turki melihat bahwa AKP ini menjadi cikal bakal penerus perjuangan Necmetin Erbakan yang memiliki kecenderungan dalam ideologi Islam (Junaidi, 2016).

Adapun yang dilihat dalam kacamata umum saat ini ketika melihat Turki sebagai kekuatan baru, tidak dapat terlepas dari pemimpinnya saat ini yaitu Recep Tayyip Erdogan. Setidaknya pada era Erdogan Turki muncul sebagai sebuah kekuatan baru yang diperhitungkan. Masuknya Turki pada konflik di suriah, dimana secara tidak langsung mereka bisa dikatakan sedang "memamerkan kekuatannya". Apa yang disebutkan oleh Howard Eissentat, lewat masa kepemimpinan Erdogan, Turki dianggap perlu mengambil sebuah sikap sebagai respon dari dinamika persaingan kekuatan regional dan global sebagai usaha dalam mendapatkan tempat yang layak dalam tatanan tersebut. Hal tersebut tercermin dari bagaimana masuknya militer Turki kedalam daerah konflik di negara-negara yang memiliki kesamaan akar budaya atau etnis dengan mereka. Eissentat mengatakan ini sebagai sebuah tindakan dimana Turki ingin mengambil peran utama di Timur Tengah dan dunia Muslim (Syahranto, 2020).

Dengan merujuk pada empat hal pokok yang dikemukakan oleh Viotti dan Kauppi dan fenomena "offense-defense" dalam melihat Turki dan hubungannya pada Uni Eropa dan negara di kawasan sekitar Turki. penulis melihat bahwa kemunculan Turki saat ini, dianggap sebagai sebuah ancaman bagi negara disekitarnya. Akhirnya banyak negara yang mencoba tindakan *zero sum* dengan meningkatkan sisi defensif mereka.

Adapun sebagai ancaman kawasan, terkhusus aktivitas Turki

dalam ekspansinya di Mediterania Timur, dan Laut Aegea, yang dilihat oleh komunitas negara Eropa, seperti Yunani, Siprus, Perancis, Malta, ataupun negara anggota UE melihat Turki sebagai sebuah ancaman baru bagi mereka, Yunani pun justru memperkuat pertahanannya dengan menggandeng negara lain untuk membuat semacam "kerjasama keamanan", dan melihat Turki jauh lebih daripada sekedar kekuatan baru yg muncul. Melihat Turki yang baru cepat berkembang selama sepuluh tahun terakhir, menjadi sebuah pertanda Turki setidaknya berada pada jalur yang tepat dalam usaha *shifting* mereka dari negara yang mencoba bertahan menuju negara yang membuat negara lain bertahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, H., & Mukti, A. (1994). *Islam dan Sekularisme di Turki Modern*. Jakarta: Djamban.
- Alvarez, J. E. (2006). International Organization: Then and Now. *The American Journal of International Law*, 324-327.
- Archer, C. (2001). *International Organizations* (3rd ed.). New York: Routledge (Taylor and Francis).
- Asrudin, A. (2014, Desember). Thomas Kuhn dan Teori Hubungan Internasional: Realisme sebagai Paradigma. *Indonesian Journal of International Studies*, 2(1), 107-122.
- Bahri, S. (2017). Pemikiran Politik Recep Tayyeb Erdogan (Studi Terhadap Pergaulatan Politik Sekular Versus Islam dalam Revolusi Turki). *MEIS (Jurnal Middle East and Islamic Studies)*, 4(2), 329-380.
- BBC News. (2007, Juli 18). *Recep Tayyip Erdogan and his Islamist-leaning Justice and Development (AK) Party have run Turkey since 2002*. Diakses pada November 17, 2020 dari <http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6900616.stm>
- CNN. (2019, Oktober 22). *Turki Tidak Lagi Jadi Sekutu Patuh Nato*. Diakses

- pada November 17, 2020 dari <https://www.matamatapolitik.com/er-dogan-ajukan-opsi-nuklir-turki-tak-lagi-jadi-sekutu-patuh-nato-analisis/>
- Coulumbis, T., & James, W. H. (1999). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional : Keadilan dan Power*. Jakarta: CV. Putra A Bardin.
- Evera, V. (1998). Offense, Defense, and the Causes of War. *International Security*, 22(4), 5-43.
- Firmansyah, T. (2020, September 12). *Di Balik Ambisi Politik Luar Negeri Erdogan*. Diakses pada November 17, 2020 dari <https://republika.co.id/berita/qgjav1318/di-balik-ambisi-politik-luar-negeri-erdogan>
- Glaser, C., & Kauffman, C. (1998). What is the Offense-defense balance and can we measure it. *International Security*, 44-82.
- Hoffman, S. (1988). *Keamanan dalam Zaman Bergolak : Alat-Alat Respon. Dalam Bertram, Konflik Dunia Ketiga dan Keamanan Dunia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Huntington, S. (2005). *Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia*. (Ruslani, Penyunt., & M. S. Ismail, Penerj.) Yogyakarta: Penerbit Qalam.
- Jervis, R. (1978). Cooperation Under Security Dilemma. *World Politics*, 30(2), 167-214.
- Junaidi, A. (2016). Kebijakan Politik Recep Tayyib Erdogan dan Islamisme Turki Kontemporer. *IN RIGHT : Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 6(1), 142-200.
- Kreisler, H. (2002, April 8). *Conversations with John J. Maersheimer : Through the Realist Lens*. Diakses pada November 11, 2020, dari Intitute of International Studies, UC Berkeley: <http://globetrotter.berkeley.edu/people2/Mearsheimer/mearsheimer-con2.html>
- Maulaa, M. R. (Penyunt.). (2020, September 12). *Konflik Mediterania Makin Kencang, Yunani Dapat Dukungan 6 Anggota Uni Eropa untuk Tundukkan Turki*. Diakses pada November 17, 2020 dari <https://www.pikiran-rakyat.com/internasional/pr-01737088/konflik-mediterrania-makin-kencang-yunani-dapat-dukungan-6-anggota-uni-eropa-untuk-tundukkan-turki>
- Maulana, V. (2020, November 2). *PT.Sindonews Portal Indonesia (SPI)*. Diakses dari <https://international.sindonews.com/read/217114/41/turki-lanjutkan-eksplorasi-di-laut-mediterrania-yunani-murka-1604308311>
- Mearsheimer, J. J. (1994). The False Promise of International Institutions. *International Security*, 19(3).
- Morgenthau, H. J. (1985). *Politics Among Nations : The Struggle for Power and Peace*. New York: Alfre A. Knof.
- Nainggolan, P. P. (2020, Agustus). Erdogan dan Turki Sebagai Kekuatan Baru di Timur Tengah. *InfoSingkat*, 12(16), 7-12.
- Rofii, S. (2017). Potret Diplomasi Turki Menuju Keanggotaan Tetap Uni Eropa. *Interpedence Jurnal (Hubungan Internasional)*, 5(2), 86-93.
- Rosenau, J. N., Boyd, G., & Thompson, K. W. (1976). *World politics an introduction*. New York: The Free Press.
- Sakinah, K. (2020, Maret 4). *Runtuhnya Kekhalifan Turki Utsmani Pada 3 Maret 1924*. Diakses dari <https://republika.co.id/berita/q6nm8b366/runtuhnya-kekhalifahan-turki-utsmani-pada-3-maret-1924>
- Sicca, S. P. (2020, September 15). *Militer Turki Desak Presiden Erdogan untuk Lawan Eropa*. Diakses pada November 17, 2020 dari <https://www.kompas.com/global/read/2020/09/15/120813170/militer-turki-desak-presiden-erdogan-untuk-lawan-eropa?page=all>
- Sorensen, G. (2003). *Demokrasi dan Demokratisasi : Proses dan Prospek dalam Sebuah Dunia yang Sedang Berubah*. Yogyakarta: CCSS & Pustaka Belajar.

Syahrianto, M. (Penyunt.). (2020, September 17). *Warta Ekonomi*. Diakses pada November 10, 2020 dari <https://www.wartaekonomi.co.id/read/304502/kekuatan-turki-siap-lawan-dominasi-barat-atas-dunia-islam>

Viotti, P. R., & Kauppi, M. V. (1999). *International Relation Theory : Realism, Pluralism, Globalism, and Beyond*. London: Ally and Bacon.

Waltz, K. (1979). *Theory of International politics* . New York: Megraw Hill.